

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keberlanjutan (*Sustainability Theory*)

Sustainability Maturity Model adalah suatu pendekatan yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mengenali tantangan keberlanjutan, merumuskan strategi berkelanjutan, mengembangkan model bisnis baru, serta menerapkan konsep ekonomi sirkular (Baumgartner & Ebner, 2010). Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi kesenjangan dengan menyusun profil aspek-aspek khusus yang relevan dengan strategi kapabilitas berkelanjutan, sesuai dengan ciri-ciri strategi keberlanjutan itu sendiri. Oleh karena itu, isu-isu utama dalam berkelanjutan ditetapkan sebagai nilai jangka panjang yang perlu diimplementasikan secara efektif guna mencapai target keberlanjutan yang telah dirumuskan.

Peningkatan nilai jangka panjang dapat dicapai secara berkelanjutan melalui performa bisnis yang mampu mengintegrasikan aspek-aspek bernilai ekonomi, sosial, serta lingkungan (Trimagnus, 2019). Serta umumnya berpedoman pada konsep 3P yaitu *people*, *profit*, dan *planet*. Sebaliknya, terdapat pendekatan lain yang dapat diterapkan dalam merumuskan strategi keberlanjutan, seperti yang menitikberatkan pada orientasi internal maupun eksternal dari komitmen terhadap keberlanjutan. Pendekatan ini dapat digunakan oleh perusahaan yang telah memiliki komitmen terhadap keberlanjutan untuk menilai konsistensi mereka dalam menjalankan berbagai bentuk strategi keberlanjutan yang diadopsi.

Baumgartner et al (2010) dijelaskan bahwa dalam kerangka konsep ini, jenis strategi menggambarkan alternative umum yang dapat digunakan untuk merespons tantangan keberlanjutan. Misalnya, dengan mempertimbangkan perbedaan aspek lingkungan dan sosial dari suatu aktivitas bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti :

- a. *Introvert* - strategi mitigasi risiko: berfokus pada pemenuhan hukum serta standard eksternal terkait aspek sosial dan lingkungan guna meminimalkan potensi risiko bagi perusahaan.
- b. *Ekstrovert* - strategi legitimasi: mengutamakan pembangunan hubungan eksternal serta memperoleh izin atau pengakuan untuk beroperasi.
- c. *Konservatif* - strategi efisiensi: menitikberatkan pada peningkatan efisiensi lingkungan serta penerapan proses produksi yang lebih ramah lingkungan.
- d. *Visioner* - strategi keberlanjutan holistik: fokus ini menitikberatkan perhatian pada berbagai isu keberlanjutan dalam seluruh aktivitas bisnis, seperti keunggulan bersaing diperoleh melalui diferensiasi dan inovasi, yang memberikan nilai tambah tersendiri bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan. Strategi ini juga dapat diterapkan dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu melalui pendekatan :
 - 1) Strategi *visioner konvensional* : didasarkan pada pemanfaatan peluang pasar yang bersifat oportunistik. Selama isu-isu keberlanjutan mampu menciptakan keunggulan kompetitif di pasar, maka hal tersebut menjadi bagian dari praktik manajemen strategis perusahaan yang bersifat visioner. Dengan demikian, pendekatannya berorientasi eksternal, dimana informasi untuk menyusun strategi diperoleh melalui pandangan pasar.
 - 2) Strategi *visioner sistemik* : pendekatan ini menyatukan perspektif luar-dalam, dimana pandangan yang berorientasi pada pasar dilengkapi dengan pendekatan yang berfokus pada sumber daya internal serta prinsip pembangunan berkelanjutan, yang keseluruhannya ditempatkan dalam kerangka normative.

Teori *sustainability* pertama kali dikemukakan oleh (Meadows dkk, 1992) yang menggambarkan bagaimana masyarakat berupaya mengedepankan tanggapan sosial terhadap isu-isu lingkungan dan ekonomi. Tanggapan sosial tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang (WCED, 1987). Konsep keberlanjutan terus mengalami perkembangan dan kini banyak diterapkan dalam kerangka

corporate sustainability. *Corporate sustainability* dipandang sebagai strategi bisnis sekaligus investasi yang mampu meningkatkan praktik perusahaan dengan tetap menjaga keseimbangan kebutuhan pemangku kepentingan masa kini maupun masa depan. Pendekatan ini berfokus pada keseimbangan tiga aspek utama kinerja perusahaan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keberlanjutan perusahaan umumnya dievaluasi melalui pendekatan *Triple Bottom Line (TBL)*, sebuah konsep yang dipekenalkan oleh Elkington & Rowlands pada tahun 1999. TBL mencakup tidak aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Pemer dkk (2020), penerapan prinsip TBL kedalam strategi manajerial perusahaan merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan. Temuan dari Markley dan Davis (2007) serta Pemer dkk. (2020) menunjukkan bahwa organisasi yang memprioritaskan aspek-aspek tersebut mampu meningkatkan daya saing perusahaan secara signifikan.

Konsep keberlanjutan dalam UMKM dapat dipahami melalui pendekatan *Triple Bottom Line (3P: People, Planet, Profit)*, yang antara lain :

a. *People* (Manusia/Sosial)

Aspek sosial menekankan pentingnya UMKM dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, maupun kontribusi pada pembangunan komunitas lokal. UMKM yang memperhatikan keberlanjutan sosial biasanya menjaga hubungan baik dengan karyawan, konsumen, serta masyarakat sekitar. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas dan menciptakan citra positif bagi usaha.

b. *Planet* (Lingkungan)

Keberlanjutan juga menuntut UMKM untuk memperhatikan dampak lingkungannya. Praktik ramah lingkungan, seperti efisiensi energy, penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab, serta pengelolaan limbah, dapat membantu UMKM mengurangi jejak ekologis. Meskipun terkadang dianggap sebagai beban tambahan, praktik ini justru dapat meningkatkan efisiensi biaya dalam jangka panjang dan memperkuat daya saing usaha.

c. *Profit* (Ekonomi/Keuntungan)

Aspek ekonomi tetap menjadi pilar utama bagi keberlangsungan UMKM. Namun, keuntungan yang berkelanjutan bukan hanya tentang laba jangka pendek, melainkan tentang penciptaan nilai jangka panjang. UMKM yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam praktik bisnisnya cenderung lebih stabil dalam menghadapi risiko, mampu memperluas akses pasar, serta memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal.

Keberlanjutan dalam UMKM tidak hanya dipahami sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan sebagai upaya holistic yang mencakup keseimbangan antara kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Integrasi prinsip 3P ini menjadi kunci penting agar UMKM dapat terus berkembang, berdaya saing, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi berbagai pemangku kepentingan.

a. Pengertian Keberlanjutan

Istilah keberlanjutan atau *sustainability* berasal dari bahasa Inggris, dimana kata *sustain* berarti mempertahankan atau melanjutkan, dan *ability* berarti kemampuan. Dengan demikian, *sustainability* dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk terus berlangsung. Keberlanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Menurut (Ahmad & Lutfi, 2020) keberlanjutan diartikan sebagai kemampuan guna memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi hak generasi mendatang. Konsep ini berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sering dikenal dengan sebutan 3P, *profit, planet, and people*. Ketiga aspek tersebut harus dijaga keseimbangannya agar keberlanjutan dapat tercapai. Ketidakseimbangan dalam satu pilar, seperti kurangnya perhatian terhadap dimensi sosial atau lingkungan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan atau ketimpangan.

Keberlanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara

seimbang, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya saat ini tanpa mengurangi kapasitas generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka dimasa depan.

b. Konsep Keberlanjutan Dalam Konteks UMKM

Keberlanjutan (*sustainability*) pada dasarnya merujuk pada kemampuan suatu entitas untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga keberlangsungan usaha dari sisi keuntungan, tetapi juga bagaimana usaha tersebut mampu beradaptasi terhadap dinamika pasar, menjaga hubungan dengan *stakeholder*, serta berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Umkm yang berorientasi pada keberlanjutan cenderung memiliki strategi bisnis yang lebih resilien. Hal ini karena mereka tidak semata-mata berfokus pada pencapaian laba jangka pendek, melainkan juga mempertimbangkan efisiensi sumber daya, etika dalam praktik usaha, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberlanjutan dapat dipandang sebagai fondasi bagi UMKM untuk tetap eksis dalam menghadapi persaingan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi berbagai pihak yang terkait.

Konsep keberlanjutan pada UMKM juga erat kaitannya dengan kemampuan pengusaha dalam mengelola tantangan, seperti perubahan teknologi, fluktuasi permintaan, maupun kebijakan pemerintah. UMKM yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan biasanya lebih adaptif dalam mengelola risiko serta memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing.

Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, UMKM dapat membangun reputasi positif, memperluas jaringan pasar, serta menciptakan nilai tambah uang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam UMKM dapat dipandang sebagai strategi penting dalam mencapai pertumbuhan yang stabil, berkelanjutan, dan berdaya saing di era modern.

c. Tujuan dan Manfaat Keberlanjutan

Menurut Setianingtias *et al* (2019) terdapat tujuan dasar dari keberlanjutan yaitu :

- 1) Untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi pasca berakhirnya era *Millenium Development Goals (MDGs)* dengan mengintegrasikan sejumlah tujuan baru dalam agenda pembangunan.
- 2) Layak secara ekonomi, yakni pembangunan keberlanjutan dilakukan secara adaptif sambil menjaga fungsi dan keberagaman system, serta menghasilkan mafaat ekonomi yang signifikan.
- 3) Diterima secara sosial-politik dan menghargai nilai budaya, yaitu pembangunan yang selaras dengan norma sosial dan politik serta memperhatikan sensitivitas budaya lokal.
- 4) Berorientasi lingkungan, yaitu mendukung praktik ramah lingkungan, termasuk penguatan citra produk seperti hasil hutan non kayu, serta menjaga dan melestarikan jasa ekosistem yang disediakan oleh alam.

2. Keberlanjutan Usaha

Perusahaan atau badan usaha adalah entitas organisasi yang dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang modal (profitabilitas). Namun, selain mengejar laba perusahaan juga memiliki tujuan penting lainnya, yaitu menjaga kelangsungan usahanya ditengah persaingan bisnis. Keberlanjutan usaha dapat diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan, yang mencerminkan nilai perusahaan saat ini berdasarkan potensi dimasa mendatang. Prinsip kelangsungan usaha berasumsi bahwa perusahaan akan tetap menjalankan aktivitas operasionalnya selama proyek, kontrak, dan kegiatan yang sedang berlangsung belum selesai. Kemampuan perusahaan menjadi faktor krusial bagi manajemen dan pemilik usaha, terutama untuk mendeteksi risiko kebangkrutan sejak dini, karena kebangkrutan dapat menimbulkan berbagai beban biaya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Keberlanjutan usaha menggambarkan situasi ketika sebuah perusahaan memiliki sumber dana yang memadai untuk mempertahankan serta mengembangkan aktivitas operasionalnya. Aspek ini kerap dikaitkan dengan risiko kebangkrutan, karena pada praktiknya perusahaan cenderung lebih waspada terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, termasuk kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi keuangan yang kritis, ditandai dengan permasalahan likuiditas yang serius dan hanya dapat diselesaikan melalui restrukturisasi besar-besaran terhadap operasional dan struktur perusahaan. Umumnya, kebangkrutan diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Istilah kebangkrutan juga sering dikaitkan dengan proses likuidasi, penghentian operasional, atau kondisi tidak mampu membayar hutang (*insolvabilitas*).

Menurut Svensson et al. (2011) dan Salimath et al (2011), keberlanjutan bisnis didefinisikan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan dampak negative terhadap isu-isu ekologis. Sementara itu, Agustina et al (2022) menyatakan bahwa keberlanjutan bisnis mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk terus bertahan dalam jangka panjang, menjaga nilai-nilai inti organisasi, membangun budaya perusahaan yang kuat, serta mencapai stabilitas dan pertumbuhan keuntungan secara berkelanjutan.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha

Secara garis besar penyebab kebangkrutan menurut Darsono dan Ashari (2015: 102) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Faktor Internal

- a) Kinerja manajerial yang kurang optimal dapat menimbulkan kerugian secara berkelanjutan, yang pada akhirnya membuat perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban financial.
- b) Ketidakseimbangan antara struktur modal dengan jumlah piutang dan utang yang dimiliki dapat menjadi masalah. Utang yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan beban bunga yang besar, sehingga mengurangi keuntungan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian. Sementara itu,

piutang yang terlalu besar juga tidak menguntungkan karena menyebabkan terlalu banyak asset yang tidak produktif dan tidak menghasilkan pendapatan.

- c) Tindakan moral *hazard* yang dilakukan oleh pihak manajemen, seperti praktik kecurangan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kebangkrutan perusahaan. Perilaku ini menimbulkan kerugian signifikan yang berpengaruh langsung pada kondisi keuangan perusahaan hingga akhirnya berujung pada kegagalan operasional atau kebangkrutan.

2) Faktor Eksternal

- a) Perubahan preferensi konsumen yang tidak segera direspon oleh perusahaan dapat menyebabkan kehilangan pelanggan dan berdampak pada menurunnya pendapatan.
- b) Gangguan pasokan bahan baku dari pemasok yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan produksi dapat menyebabkan kendala dalam operasional perusahaan.
- c) Perusahaan juga harus mewaspadai risiko dari pihak debitur, seperti potensi kecurangan atau ketidakmampuan melunasi hutang. Piutang yang terlalu banyak dengan jangka waktu pengembalian yang lama dapat menyebabkan asset tidak produktif, sehingga mengurangi pendapatan dan menimbulkan kerugian.
- d) Ketegangan hubungan dengan kreditur dapat membahayakan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola utangnya secara efisien dan mejaga komunikasi yang baik dengan kreditur.
- e) Meningkatnya persaingan pasar menuntut perusahaan untuk terus melakukan perbaikan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan bertahan dalam persaingan.
- f) Perusahaan juga harus tanggap terhadap dinamika ekonomi global. Karena keterkaitan ekonomi antarnegara semakin kuat, perkembangan

ekonomi internasional dapat memengaruhi kondisi internal perusahaan dan harus diantisipasi dengan strategi yang tepat.

b. Manfaat Prediksi Keberlanjutan Usaha

Informasi mengenai prediksi keberlanjutan usaha memiliki peran penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

1) Pemberi Pinjaman

Data mengenai keberlanjutan usaha dapat menjadi acuan dalam menentukan kelayakan calon penerima pinjaman serta membantu dalam merumuskan kebijakan pemantauan terhadap pinjaman yang telah diberikan.

2) Investor

Pemegang saham maupun obligasi suatu perusahaan tentu memiliki kepentingan besar dalam mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan penerbit surat berharga tersebut. Investor yang menerapkan strategi investasi aktif biasanya akan merancang model prediktif untuk menilai keberlangsungan usaha dan mendeteksi gejala kebangkrutan sejak dini, agar dapat mengambil langkah antisipatif lebih awal.

3) Pihak Pemerintah

Dalam beberapa bidang usaha, instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasional perusahaan, termasuk badan usaha milik negara yang memerlukan pengawasan secara berkala. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengidentifikasi potensi kebangkrutan sejak awal agar dapat segera mengambil langkah penanganan yang diperlukan.

4) Akuntan

Profesi akuntan memiliki kepentingan terhadap informasi mengenai kesinambungan usaha karena hal ini menjadi dasar dalam menilai kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi (*going concern*).

5) Manajemen

Kebangkrutan akan menimbulkan beban biaya yang cukup besar, baik secara langsung seperti honor akuntan dan jasa hukum, maupun secara

tidak langsung, seperti kehilangan peluang penjualan atau pendapatan akibat pembatasan hukum yang mungkin diberlakukan. Jika manajemen mampu mengenali potensi kebangkrutan lebih awal, maka langkah efisiensi seperti *merger* atau restrukturisasi keuangan dapat segera diambil guna meminimalkan atau menghindari kerugian yang lebih besar.

3. Resource Based View (RBV)

Resource Based View (RBV) merupakan salah satu pendekatan dalam manajemen strategis yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan dapat diperoleh melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya internal perusahaan. Sumber daya tersebut harus memenuhi kriteria VRIN, yakni memiliki nilai (*valuable*), bersifat langka (*rare*), sulit ditiru (*imitabel*), serta tidak dapat digantikan (*non-substitutable*).

Teori RBV pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Jay Barney melalui publikasinya berjudul “*Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*” pada tahun 1991. Dalam karyanya, Barney menekankan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya unik dan mampu mengelolanya dengan tepat akan memperoleh keunggulan kompetitif yang lebih kuat dibandingkan para pesaingnya. Seiring perkembangannya, konsep RBV semakin banyak diaplikasikan dalam manajemen strategis dan pengembangan bisnis, terutama untuk menjelaskan bagaimana organisasi dapat menciptakan nilai melalui pemanfaatan dan penguatan sumber daya internal yang dimilikinya.

Menurut Barney (1991), dalam perspektif RBV sumber daya yang dimaksud mencakup asset berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Akan tetapi, seiring perkembangan teori ini, perhatian lebih banyak diarahkan pada sumber daya non-keuangan seperti pengetahuan, inovasi, keterampilan manajerial, jaringan hubungan, serta kemampuan dalam beradaptasi dengan teknologi digital. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya non-keuangan umumnya lebih sulit ditiru oleh pesaing, sehingga mampu memberikan peluang yang lebih besar dalam membangung keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Teori RBV menekankan bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi lebih pada bagaimana suatu organisasi mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya internal yang dimilikinya. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini menjadi penting karena keterbatasan modal dan akses pasar sering kali membuat pelaku usaha kecil harus mengoptimalkan asset yang ada agar tetap bertahan dan berkembang. Sumber daya internal yang dimaksud tidak hanya mencakup asset berwujud seperti peralatan produksi, bahan baku, dan lokasi usaha, tetapi juga asset tidak berwujud, misalnya pengetahuan kewirausahaan, keterampilan manajerial, inovasi produk, serta jaringan sosial dan relasi bisnis.

Dengan perspektif RBV, keberlanjutan UMKM dapat dicapai apabila pelaku usaha mampu mengembangkan sumber daya yang memiliki karakteristik VRIN. Sebagai contoh, pengetahuan lokal yang khas, cita rasa produk yang unik, atau kemampuan membangun hubungan baik dengan konsumen dapat menjadi modal penting yang sulit ditiru oleh pesaing. Selain itu, kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital juga menjadi faktor penentu menjaga daya saing jangka panjang.

Penerapan RBV dalam UMKM juga menegaskan bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya diukur dari keberhasilan mempertahankan operasional bisnis, tetapi juga dari kemampuan menciptakan nilai tambah yang konsisten bagi pelanggan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya internal secara efektif, UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dinamika pasar. Hal ini menunjukkan bahwa teori RBV memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan bagaimana UMKM dapat mencapai keberlanjutan melalui optimalisasi asset dan kapabilitas internal yang mereka miliki.

4. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior dipandang sebagai kerangka teoritis yang tepat dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, karena pada

dasarnya tindakan individu sangat dipengaruhi oleh niat mereka untuk melakukannya. Menurut Ajzen (1991), menjelaskan bahwa perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi control perilaku. Ketiga komponen ini membentuk intensi atau niat individu untuk melakukan suatu tindakan, yang pada akhirnya terwujud dalam perilaku nyata. Dalam konteks pengelolaan keuangan, TPB dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana pelaku usaha, termasuk UMKM, mengambil keputusan dalam mengatur dan mengelola sumber daya keuangan.

Sikap terhadap perilaku mencerminkan sejauh mana individu menilai positif atau negatif suatu tindakan. Apabila pelaku UMKM memiliki pandangan positif terhadap praktik pengelolaan keuangan, misalnya pencatatan keuangan yang teratur atau perencanaan anggaran yang baik, maka cenderung memiliki intensi lebih kuat untuk menerapkan perilaku tersebut.

Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial atau ekspektasi dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, rekan usaha, maupun komunitas bisnis. Dukungan sosial yang mendorong pentingnya pengelolaan keuangan akan mempengaruhi individu untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku keuangan tidak hanya ditentukan oleh sikap pribadi, tetapi juga oleh pengaruh eksternal dari lingkungan sosial.

Persepsi control perilaku menggambarkan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, pelaku UMKM yang merasa memiliki kemampuan, keterampilan, serta akses terhadap informasi dan teknologi pendukung akan lebih percaya diri dalam mengelola keuangan secara efektif. Sebaliknya, apabila mereka merasa tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka intensi dan perilaku pengelolaan keuangan akan cenderung rendah.

TPB dapat memberikan pemahaman bahwa perilaku pengelolaan keuangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor rasional, tetapi juga oleh persepsi, norma, dan dukungan sosial. Relevansi teori ini penting dalam menjelaskan bagaimana niat dan tindakan pelaku UMKM dalam mengelola

keuangan dapat dibentuk, ditingkatkan, dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Hal ini sekaligus memberikan dasar teoritis bahwa peningkatan literasi keuangan dan dukungan sosial dapat memperkuat intensi serta praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan usaha.

5. Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

(Mitchell et al., 2011) menyatakan bahwa literasi keuangan merujuk pada seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu dalam mengelola keuangan secara efektif, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan. Kemampuan ini berkaitan erat dengan perilaku, kebiasaan individu, serta berbagai faktor eksternal yang mempengaruhinya. Disisi lain, literasi keuangan dapat dipahami sebagai kemampuan dalam mengelola aspek keuangan secara efektif, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih sejahtera dimasa mendatang.

Menurut *Financial Literacy Assessment Framework PISA 2012* (OECD INFE, 2012), literasi keuangan dianggap sebagai elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Dari perspektif konsumen, pemahaman keuangan yang baik mendorong pengambilan keputusan belanja yang lebih berorientasi pada kualitas. Dampaknya, industry akan terdorong untuk bersaing secara sehat dengan menonjolkan inovasi dalam produk layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, literasi keuangan yang memadai juga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam mengambil keputusan terkait isu-isu ekonomi dan keuangan. Sementara itu, bagi penyedia layanan keuangan, konsumen yang literat secara financial secara finansial akan lebih mampu memahami informasi produk dan risiko yang terkait. Dari sisi pemerintah, tingginya tingkat literasi keuangan masyarakat akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan public.

Menurut (Huston, 2010) literasi keuangan merupakan kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif guna mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Setiap individu perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai literasi keuangan sebagai langkah menuju kehidupan ekonomi yang lebih sejahtera dimasa depan. Pengelolaan pendapatan yang cermat dan tepat sangat penting dalam menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Besarnya penghasilan tidak menjamin kesejahteraan apabila tidak disertai dengan kemampuan dalam mengatur keuangan secara bijak, karena hal tersebut justru bisa menjadi hambatan dalam jangka panjang.

Literasi keuangan berfungsi sebagai bekal penting bagi seseorang dalam menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan finansial individu tersebut (Maisyarah & Paramita, 2018). Sedangkan menurut (Lusardi et al., 2010) menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan yang dimiliki individu agar dapat mengelola dan memanfaatkan uang secara efektif guna meningkatkan kualitas hidupnya. Literasi ini memiliki keterkaitan erat dengan pola perilaku, kebiasaan individu, serta pengaruh dari lingkungan eksternal. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam membentuk dan memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.

OJK menggambarkan literasi keuangan sebagai rangkaian aktivitas atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keyakinan masyarakat maupun konsumen agar mereka mampu mengelola keuangan pribadinya secara lebih efektif.

b. Tingkat Literasi Keuangan

OJK membagi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia kedalam empat klasifikasi utama, yaitu :

- 1) *Well literate*, individu dalam kategori ini memiliki pengetahuan yang baik, keterampilan, serta keyakinan terhadap produk serta jasa yang disediakan oleh institusi keuangan.
- 2) *Sufficient literate*, individu ini memahami serta percaya terhadap lembaga keuangan, termasuk produk dan layanan yang disediakannya.
- 3) *Less literate*, individu hanya mengetahui keberadaan lembaga, produk, dan layanan keuangan, namun pemahamannya masih terbatas.
- 4) *Not literate*, individu tersebut tidak memiliki pemahaman, keterampilan, maupun keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan.

c. Aspek-aspek Literasi Keuangan

Menurut (Ulfatun, Udhma, Dewi, 2016), keuangan terbagi menjadi empat aspek, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemahaman mengenai berbagai aspek dasar dalam pengelolaan keuangan pribadi,
- 2) *Savings and borrowing* (tabungan dan pinjaman), mencakup wawasan seputar penggunaan produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan kartu kredit,
- 3) *Insurance* (asuransi), meliputi pengetahuan mendasar tentang asuransi serta berbagai jenis produk asuransi seperti asuransi jiwa dan kendaraan bermotor,
- 4) *Investment* (investasi), mencakup pemahaman tentang instrument investasi, termasuk suku bunga pasar, reksa dana, serta potensi risiko yang menyertainya.

Menurut (Huston, 2010) literasi keuangan dapat dinilai melalui sejumlah indicator, antara lain :

- 1) Tingkat pendapatan,
- 2) Pola pengeluaran,
- 3) Pemahaman mengenai kredit
- 4) Pengetahuan tentang tabungan,
- 5) Wawasan terkait investasi.

Secara lebih luas, variabel literasi keuangan mencerminkan kemampuan individu dalam memahami nilai tukar uang, karakteristik layanan keuangan, pencatatan arus keuangan, serta sikap dalam mengelola pengeluaran. Menurut (Widayat, 2010) terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat literasi keuangan, yaitu :

- 1) Membuat perencanaan terkait pendapatan yang akan diterima,
- 2) Menyusun rencana pengeluaran atau biaya yang akan dikeluarkan,
- 3) Disiplin dalam mengikuti rencana anggaran yang telah dibuat,
- 4) Memiliki pemahaman mengenai nilai riil dari urang,
- 5) Memahami konsep nilai nominal uang,
- 6) Mengetahui dampang serta konsep inflasi.

6. Perencanaan Keuangan

a. Pengertian Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan merupakan suatu proses sistematis dalam mencapai tujuan-tujuan hidup individu melalui pengelolaan keuangan yang terstruktur. Tujuan tersebut dapat mencakup kepemilikan rumah, penyediaan dana pendidikan anak, hingga persiapan masa pensiun. Penyusunan rancana keuangan secara menyeluruh sejak dini dapat membantu individu untuk lebih terarah dalam mengelola keuangannya, sehingga memberikan manfaat yang signifikan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Sebelum menyusun perencanaan keuangan, disarankan untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui *financial check up*, yaitu proses pemeriksaan menyeluruh atas kondisi finansial individu dengan tujuan menilai tingkat kesehatan keuangannya. Melalui evaluasi ini, seseorang dapat mengetahui apakah keuangannya berada dalam kondisi yang stabil atau justru memerlukan perbaikan. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah perbaikan keuangan dimasa mendatang.

b. Jenis Perencanaan Keuangan

Secara umum perencanaan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Perencanaan keuangan jangka pendek

Perencanaan keuangan pada umumnya dilakukan untuk jangka waktu satu tahun. Fokus utamanya adalah menjaga kestabilan likuiditas perusahaan. Salah satu instrument yang umum digunakan dalam proses ini adalah penyusunan anggaran kas, yaitu estimasi mengenai arus kas dan kas keluar dalam suatu periode tertentu.

2) Perencanaan keuangan jangka panjang

Dalam menghadapi pengambilan keputusan strategis, seperti investasi modal dalam skala besar yang disertai dengan pilihan sumber pendanaan tertentu, perusahaan perlu memiliki proyeksi yang jelas mengenai kondisi keuangan dimasa depan. Melalui perencanaan keuangan jangka panjang yang menggunakan berbagai model keuangan, perusahaan dapat mengetahui dampak dari keputusan tersebut terhadap posisi keuangan secara keseluruhan.

Salah satu model keuangan yang umum digunakan adalah metode persentase penjualan (*sales percentage method*). Model ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan aktivitas perusahaan akan membutuhkan dana yang lebih besar, dimana penjualan dijadikan sebagai indicator utama aktivitas. Salah satu asumsi mendasar dari pendekatan ini adalah bahwa pos-pos keuangan akan berubah secara sebanding dengan perubahan penjualan. Dengan kata lain, proporsi antara penerapan model ini memerlukan kestabilan dalam hubungan proporsional tersebut.

7. Perilaku Keuangan

Menurut (Yuniningsih, 2020) *behavioral finance* merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana individu maupun institusi bertindak dan berpikir dalam proses pengambilan keputusan keuangan, baik sebagai investor perorangan maupun kelembagaan. Keputusan-keputusan tersebut seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya yang berasal dari aspek psikologis dan sosiologis. Dalam menentukan sejauh mana seseorang berani mengambil risiko, khususnya dalam pengambilan keputusan investasi, terdapat berbagai

teori yang dapat dijadikan acuan. Beberapa teori yang sering digunakan dalam konteks ini meliputi *prospect theory*, *regret theory*, *decision affect theory*, *mental accounting theory*, serta *theory of planned behaviour (TPB)*.

TPB pertama kali diperkenalkan oleh (Ajzen, 1985) melalui artikelnya yang berjudul *From Intention to Action: a Theory of Planned Behavior*". Teori ini dikembangkan sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* yang sebelumnya dikemukakan oleh (Fisbein & Ajzen, 1975). *TPB* digunakan untuk menganalisis perilaku individu, khususnya dalam menjelaskan keterkaitan antara keyakinan (*beliefs*) dan sikap (*attitudes*). Individu cenderung menilai suatu sikap atau perilaku berdasarkan keyakinan pribadi yang mereka miliki, yang berbentuk probabilitas subjektif mengenai kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut, karena tindakan yang dilakukan diyakini akan menghasilkan konsekuensi tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa individu mampu menilai sejauh mana suatu tindakan yang dilakukan berpotensi menghasilkan hasil tertentu. Tingkat kepastian terhadap hasil tersebut dipengaruhi oleh keyakinan, sikap, serta harapan yang saling berhubungan satu sama lain.

Dalam teori *planned behaviour*, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subjektif yang berasal dari tekanan atau harapan sosial, serta persepsi individu mengenai sejauh mana mereka memiliki kendali atas perilaku yang akan dilakukan. Sikap mencerminkan keyakinan individu terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukan, baik positif maupun negative. Norma subjektif merujuk pada persepsi individu mengenai pandangan atau harapan dari orang-orang yang dianggap penting terhadap perilaku tersebut. Sementara itu, persepsi control perilaku berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa mudah atau sulit dalam melaksanakan suatu tindakan.

8. Pengelolaan Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perencanaan keuangan merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mencapai berbagai

sasaran hidup yang memerlukan dukungan finansial. Pengelolaan keuangan yang tepat dan terencana memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas hidup saat ini maupun dimasa depan agar lebih baik dan sejahtera. Melalui manajemen keuangan yang efektif, individu dapat memahami dampak dari setiap keputusan finansial yang diambil terhadap aspek-aspek lain dalam kondisi keuangannya secara menyeluruh. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan keuangan juga berperan dalam membantu individu menyusun skala prioritas kebutuhan serta mengendalikan pengeluaran yang tidak mendesak atau dapat ditunda. Dengan demikian, kestabilan keuangan pribadi dan keluarga dapat tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga memungkinkan individu untuk menghadapi risiko secara lebih bijak, memperbesar peluang keluar dari tekanan ekonomi, dan membangun kehidupan yang lebih layak dan berkelanjutan.

Manajemen keuangan pada UMKM adalah rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengawasan, serta pemantauan terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki oleh usaha tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Kegiatan ini mencakup pencatatan transaksi keuangan, penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, pengendalian biaya, serta perencanaan investasi dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami kondisi keuangan usahanya secara menyeluruh, membuat keputusan yang rasional, serta meminimalkan risiko keuangan. Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan yang terstruktur menjadi pondasi penting dalam menciptakan stabilitas usaha, dinamika pasar yang terus berkembang.

9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, pengertian UMKM dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha

perseorangan dengan kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut. Sementara itu, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, cabang, ataupun bagian dari usaha menengah maupun usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai kriteria yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law Cipta Kerja), pengelompokan UMKM ditentukan melalui dua indicator utama, yaitu besaran modal usaha serta total penjualan tahunan. Selain itu, pasal 36 dari PP No. 7 Tahun 2021 memberikan fleksibilitas bagi kementerian atau lembaga terkait untuk menerapkan kriteria tambahan seperti kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah karyawan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan atau lokal konten sesuai kebutuhan sektor tertentu.

Secara umum, ketentuan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 20 Tahun 2008, yang menggunakan batasan berdasarkan asset dan omzet. Dengan perubahan tersebut, definisi UMKM kini lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern dan memudahkan akses pelaku usaha terhadap berbagai program pendampingan dan kebijakan pemerintah. Tujuan utama yang hendak diwujudkan adalah membangun UMKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi sehingga dapat berperan signifikan dalam proses produksi, distribusi kebutuhan pokok, penyediaan bahan baku, serta permodalan untuk menghadapi persaingan di pasar bebas.

Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM jika dibandingkan dengan perusahaan berskala besar antara lain :

- 1) Kemampuan berinovasi dalam teknologi yang memudahkan proses pengembangan produk,
- 2) Terjalinnya hubungan yang lebih dekat dan personal antar individu dalam perusahaan kecil,
- 3) Kapasitas yang cukup besar dalam menciptakan dan menyerap lapangan kerja,

- 4) Memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar yang biasanya cenderung birokratis,
- 5) Adanya dinamika manajerial serta peran kewirausahaan yang kuat.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah usaha milik perorangan atau badan usaha mandiri dengan modal hingga Rp 1 miliar (tidak termasuk aset tanah dan bangunan) dan/atau omzet tahunan paling tinggi Rp 2 miliar.
- 2) Usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp 1 miliar hingga 5 miliar, dan/atau omzet tahunan antara Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar.
- 3) Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar, dan/atau omzet tahunan lebih dari Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar.

c. Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM adalah kategori usaha dengan jumlah pelaku terbanyak. Sektor ini juga terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan UMKM menjadi hal yang penting dan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Klasifikasi UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Livelihood Activities*, jenis UMKM ini berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh mata pencaharian dan umumnya termasuk dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, UMKM yang memiliki karakteristik sebagai pengrajin namun belum sepenuhnya mengembangkan jiwa kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, UMKM yang telah mengembangkan jiwa kewirausahaan serta mampu mengerjakan proyek subkontrak dan berfokus pada pasar ekspor.

4) *Fast Moving Enterprise*, UMKM yang memiliki kematangan jika kewirausahaan dan sedang berada pada fase transformasi menuju skala usaha yang lebih besar.

B. Hasil Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian tentang Analisis Keberlanjutan UMKM Dengan Perilaku Pengelolaan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi, Peneliti menggunakan berbagai penelitian terkait sebagai landasan acuan serta pertimbangan dalam mengkaji permasalahan penelitian ini, yang merupakan hasil dari studi-studi terdahulu yang relevan dan telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Relevan

| No. | Nama/Tahun | Judul | Variabel | Metode | Hasil |
|-----|---------------------------|---|--|------------------------------------|---|
| 1. | (Agustini & Suwena, 2024) | Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Digitalisasi Bisnis, Dan Bisnis, Dan <i>Entrepreneurial Marketing</i> Terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM Sektor Perdagangan di Kecamatan Buleleng | X1 : Pengelolaan Keuangan X2 : Digitalisasi Bisnis X3 : <i>Entrepreneurial Marketing</i> Y : Keberlanjutan Usaha UMKM | Uji Asumsi Klasik | Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM sektor perdagangan. |
| 2. | (Rahmi, 2024) | <i>Analysis Of Financial Planning On The Sustainability Of Msme Businesses</i> | X : Perencanaan Keuangan Y : Keberlanjutan UMKM | Analisis Regresi | Perencanaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. |
| 3. | (Rustan, 2024) | Analisis Strategi Perencanaan Keuangan Terhadap Keberlanjutan Usaha Pada UMKM Sektor Makanan Kota Makassar | X : Perencanaan Keuangan Y : Keberlanjutan Usaha | Deskriptif Analisis dan Kualitatif | Perencanaan keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM karena faktor pengetahuan tentang literasi keuangan. |
| 4. | (Mashuri, | Pengaruh | X1 : Literasi | Analisis | Literasi |

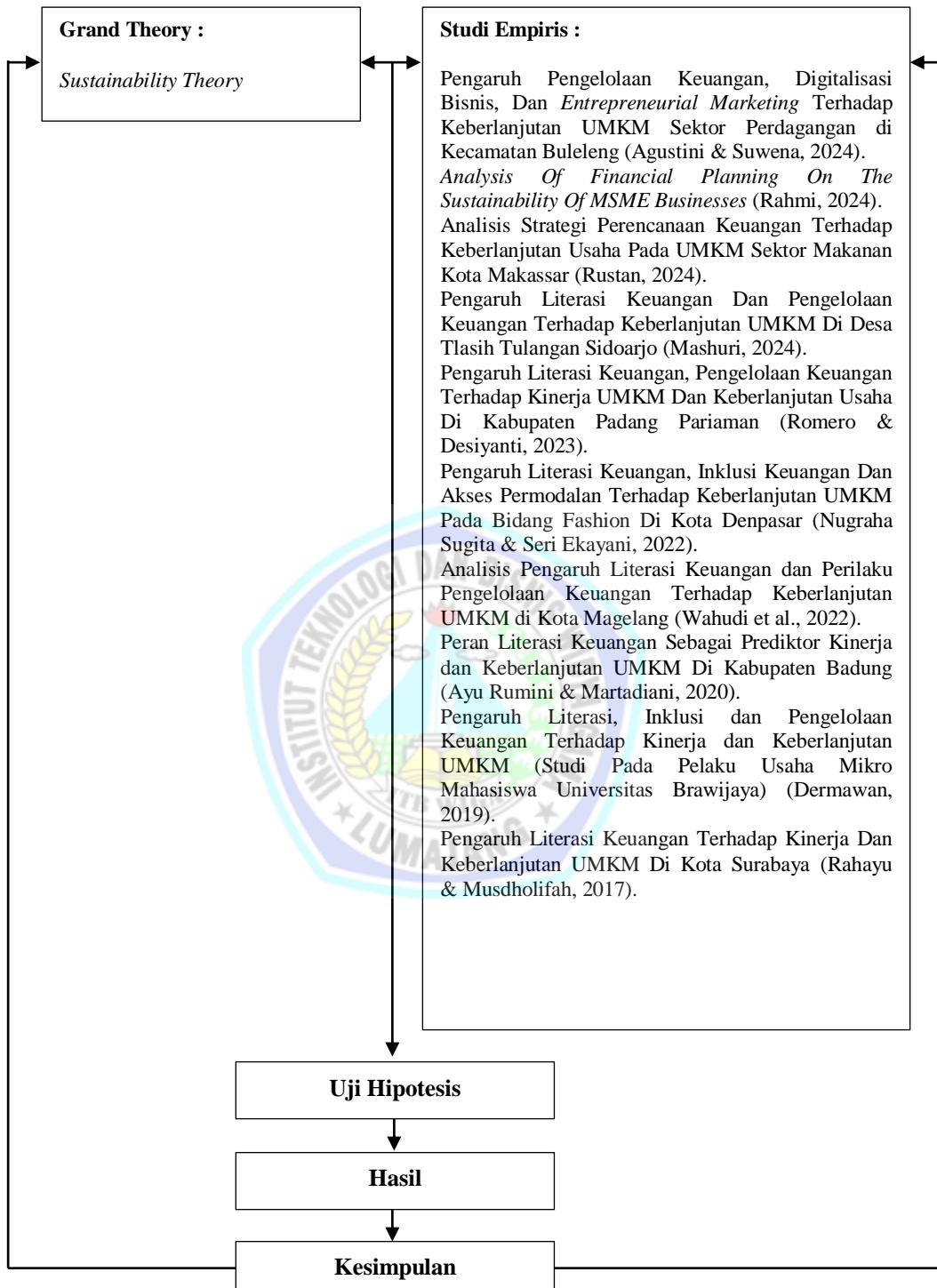
| No. | Nama/Tahun | Judul | Variabel | Metode | Hasil |
|-----|---------------------------------------|--|---|---|---|
| | 2024) | Literasi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Desa Tlasih Tulangan Sidoarjo | Keuangan X2 : Pengelolaan Keuangan Y : Keberlanjutan UMKM | Regresi Linier Berganda | keuangan dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM. |
| 5. | (Romero & Desiyanti, 2023) | Pengaruh Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Dan Keberlanjutan Usaha Di Kabupaten Padang Pariaman | X1 : Literasi keuangan X2 : Pengelolaan Keuangan Y1 : Kinerja UMKM Y2 : Keberlanjutan Usaha | Uji Asumsi Klasik | Literasi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan usaha dan pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha. |
| 6. | (Nugraha Sugita & Seri Ekayani, 2022) | Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Akses Permodalan Terhadap Keberlanjutan UMKM Pada Bidang Fashion Di Kota Denpasar | X1 : Literasi Keuangan X2 : Inklusi Keuangan X3 : Akses Permodalan Y : Keberlanjutan UMKM | Analisis Regresi Linier Berganda | Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM pada bidang fashion. |
| 7. | (Wahudi et al., 2022) | Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Magelang | X1 : Literasi Keuangan X2 : Perilaku Pengelolaan Keuangan Y : Keberlanjutan UMKM | Uji Regresi Linear Berganda | Perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. |
| 8. | (Ayu Rumini & Martadiani, 2020) | Peran Literasi Keuangan Sebagai Prediktor Kinerja dan Keberlanjutan | X1 : Literasi Keuangan Y1 : Kinerja UMKM Y2 : Keberlanjutan | Analisis SEM-PLS | Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. |

| No. | Nama/Tahun | Judul | Variabel | Metode | Hasil |
|-----|------------------------------|---|--|--------------------|--|
| 9. | (Dermawan, 2019) | UMKM Di Kabupaten Badung | UMKM | | |
| 10. | (Rahayu & Musdholifah, 2017) | Pengaruh Literasi, Inklusi dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM (Studi Pada Pelaku Usaha Mikro Mahasiswa Universitas Brawijaya) | X1 : Literasi Keuangan X2 : Inklusi Keuangan X3 : Pengelolaan Keuangan Y1 : Kinerja UMKM Y2 : Keberlanjutan UMKM | Analisis PLS-R | Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM, dan pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. |
| 11. | (Ningtyas & Andarsari, 2021) | Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan UMKM Di Kota Surabaya | X1 : Literasi Keuangan Y1 : Kinerja Usaha Y2 : Keberlanjutan Usaha | Survei Kuantitatif | Literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM. |
| | | Peran Perilaku Keuangan dalam Memoderasi Literasi Keuangan dan Keberlangsungannya Usaha | X1 : Literasi Keuangan Y : Keberlangsungannya Usaha Z : Perilaku Keuangan | SEM PLS | Perilaku keuangan memoderasi literasi keuangan terhadap keberlangsungannya usaha |

Sumber: Penelitian Terdahulu

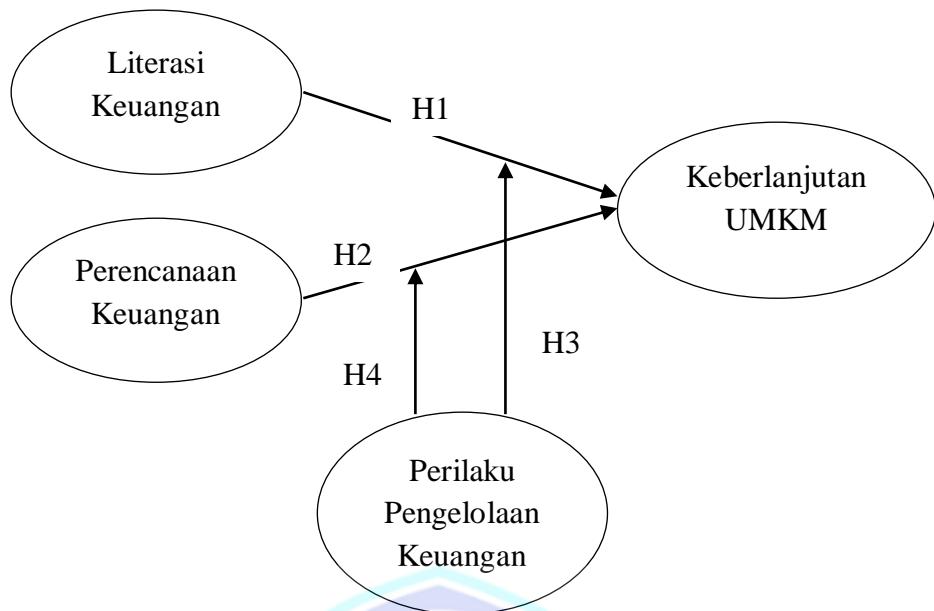
C. Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2016), kerangka berpikir adalah gambaran konseptual yang menunjukkan hubungan antara teori dengan berbagai elemen terkait yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari masalah penelitian. Kerangka ini menyajikan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan landasan teori serta temuan dari penelitian sebelumnya. Baik kerangka berpikir maupun kerangka konseptual berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai hubungan antarvariabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dan kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Penelitian Terdahulu



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Penelitian Terdahulu

Kerangka berpikir ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, diasumsikan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha, khususnya pada sektor UMKM, yang kemudian diuji melalui hipotesis pertama. Perencanaan keuangan diperkirakan memiliki pengaruh terhadap Keberlanjutan UMKM yang akan dianalisis dalam hipotesis kedua. Selain itu, perilaku pengelolaan keuangan diprediksi memiliki peran dalam memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan keberlanjutan UMKM, yang akan dibuktikan melalui pengujian hipotesis ketiga. Selanjutnya, variabel ini juga diduga memperkuat keterkaitan antara perencanaan keuangan dan keberlanjutan UMKM, yang akan diuji pada hipotesis keempat.

Kerangka berpikir ini dirancang untuk menguji peran Perilaku Pengelolaan Keuangan sebagai variabel moderasi yang menghubungkan pengaruh Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis 1 (H₁)

Literasi keuangan mengacu pada pemahaman, kemampuan, dan kepercayaan individu dalam mengelola keuangan secara tepat. Bagi para pelaku UMKM, literasi ini memegang peran penting dalam menetukan langkah strategis terkait investasi, pembiayaan, serta pengaturan arus kas. Dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek keuangan, pelaku usaha dapat lebih responsive menghadapi perubahan pasar dan potensi risiko bisnis. Dengan demikian, literasi keuangan yang tinggi diyakini dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usahanya secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Menurut *Financial Literacy Theory* (Huston, 2010), literasi keuangan merujuk pada kapasitas individu dalam memahami, mengevaluasi, serta membuat keputusan yang tepat terkait aspek keuangan. Kemampuan ini sangat penting bagi pelaku usaha karena memungkinkan mereka untuk mengelola arus kas secara efektif, mengurangi potensi risiko finansial, dan mengoptimalkan keuntungan, yang semuanya merupakan komponen vital dalam menjaga keberlanjutan usaha. Dalam konteks UMKM, literasi keuangan menjadi fondasi utama untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efisien, pengambilan keputusan yang bijaksana, serta ketahanan usaha terhadap berbagai tantangan eksternal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan sepatutnya menjadi fokus utama dalam setiap inisiatif pengembangan UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ayu Rumini & Martadiani, 2020), yang meneliti tentang Peran Literasi Keuangan Sebagai Keberlanjutan UMKM di Kabupaten Badung, menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM dan keberlanjutan UMKM. Pemahaman literasi keuangan yang memadai memungkinkan pengusaha memanfaatkan keterampilan keuangan mereka dalam menentukan berbagai keputusan penting bagi perusahaan. Pemilik atau pengelola bisnis juga akan lebih siap menghadapi keputusan

keuangan yang kompleks dan strategis, yang berperan besar dalam keberhasilan pencapaian tujuan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

Penelitian dari (Mashuri, 2024) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Keberlanjutan UMKM di Desa Tlasih Tulangan Sidoarjo, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis disimpulkan sebagai berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh antara Literasi Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM.

2. Hipotesis 2 (H_2)

Perencanaan keuangan merupakan proses strategis yang dilakukan untuk menetapkan tujuan keuangan, memetakan kebutuhan dana, dan mengatur penggunaan sumber daya keuangan secara efisien. UMKM dengan perencanaan keuangan yang matang umumnya lebih siap dalam mengelola risiko, menjaga kestabilan operasional, dan mempersiapkan pertumbuhan bisnis kedepan. Oleh karena itu, perencanaan keuangan diyakini memiliki kontribusi positif terhadap keberlanjutan UMKM karena dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha secara keseluruhan.

Perencanaan yang baik menciptakan visi dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Dalam konteks keuangan, *Financial Planning Theory* (Lusardi et al., 2010) menekankan bahwa perencanaan keuangan yang efektif membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengantisipasi risiko, dan mengukur kemajuan tujuan bisnis, yang semuanya berkontribusi pada keberlanjutan usaha.

Dalam penelitian (Fadilah & Purwanto, 2022), hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan UMKM dalam upaya mencapai keberlanjutan usaha. Perencanaan keuangan memegang peran penting dalam membentuk perilaku keuangan, dimana semakin baik tingkat perencanaan yang

dilakukan, maka semakin baik pula perilaku keuangan yang ditunjukkan oleh UMKM. (Rustan, 2024) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Strategi Perencanaan Keuangan Terhadap Keberlanjutan Usaha Pada UMKM Sektor Makanan Kota Makassar, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM karena faktor pengetahuan tentang literasi keuangan.

Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_2 : Terdapat pengaruh antara Perencanaan Keuangan terhadap Keberlanjutan UMKM.

3. Hipotesis 3 (H_3)

Perilaku pengelolaan keuangan mencerminkan cara individu maupun pelaku usaha dalam merencanakan, mengatur, serta mengendalikan penggunaan sumber daya finansial secara disiplin dan konsisten. Aspek ini tidak hanya mencakup kebiasaan transaksi dan mengendalikan pengeluaran, tetapi juga meliputi kemampuan dalam menyusun anggaran, mengelola arus kas, serta memanfaatkan sumber pembiayaan secara bijak. Meskipun literasi keuangan dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha, efek tersebut belum tentu optimal jika tidak diiringi dengan perilaku pengelolaan keuangan yang tepat.

Dalam konteks UMKM, perilaku pengelolaan keuangan berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan keberlanjutan usaha. Ketika pelaku UMKM memiliki pemahaman keuangan yang baik dan sekaligus menerapkannya melalui perilaku pengelolaan yang disiplin, maka peluang usaha untuk bertahan dan berkembang menjadi lebih besar. Sebaliknya, literasi keuangan yang tinggi tanpa diikuti perilaku pengelolaan keuangan yang memadai berpotensi melemahkan dampak positifnya terhadap keberlanjutan UMKM.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Ningtyas & Andarsari, 2021) yang menunjukkan bahwa perilaku keuangan sebagai mediator dapat memoderasi literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. Menurut penelitian (Romero & Desiyanti, 2023) dengan judul Pengaruh Literasi

Keuangan, Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM dan Keberlanjutan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman, dengan hasil pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan Usaha. *Berdasarkan* penelitian tersebut, hipotesis disimpulkan sebagai berikut :

H_3 : Perilaku pengelolaan keuangan memoderasi literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM.

4. Hipotesis 4 (H₄)

Perencanaan keuangan merupakan proses sistematis dalam menentukan tujuan finansial usaha, mengatur alokasi sumber daya, serta menetapkan strategi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan jangan panjang. Namun, keberhasilan perencanaan keuangan tidak hanya bergantung pada seberapa baik rencana tersebut disusun, melainkan juga pada sejauh mana pelaku usaha mampu menerapkannya dalam praktik nyata melalui perilaku pengelolaan keuangan.

Perilaku pengelolaan keuangan mencerminkan tindakan konkret pelaku UMKM dalam mengimplementasikan perencanaan keuangan, seperti kedisiplinan dalam pencatatan transaksi, pengendalian biaya operasional, pengaturan arus kas, serta evaluasi kinerja keuangan. Dengan demikian, perilaku pengelolaan keuangan berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh perencanaan keuangan terhadap keberlanjutan usaha. Apabila pelaku UMKM memiliki perencanaan yang baik dan diikuti perilaku pengelolaan yang konsisten, maka keberlanjutan usaha akan lebih terjamin karena setiap strategi yang dirancang dapat terealisasi dengan efektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Rachmawati, E., & Mulyani, 2021) dengan judul *Moderating Role of Financial Behavior on the Effect of Financial Planning Toward Business Sustainability in MSMEs*, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *financial behaviour* memiliki peran penting sebagai moderator. Ketika perilaku pengelolaan keuangan tinggi, hubungan antara *financial planning* dan *business sustainability* menjadi lebih kuat. Sebaliknya,

perilaku yang lemah melemahkan pengaruh perencanaan keuangan. (Wahudi et al., 2022) dengan judul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Magelang, hasil riset menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis disimpulkan sebagai berikut :

H_4 : Perilaku pengelolaan keuangan memoderasi perencanaan keuangan terhadap keberlanjutan UMKM.

